

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi dan Klasifikasi Belanja dan Beban Barang

2.1.1 Definisi dan Klasifikasi Belanja Barang

Pengertian belanja menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran, belanja merupakan semua pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum daerah atau negara yang menyebabkan ekuitas dana lancar berkurang selama periode tahun anggaran berjalan dan pemerintah tidak akan memperoleh kembali pembayarannya. Belanja barang dalam Buletin Teknis Nomor 04 mengenai Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, belanja merupakan pengeluaran untuk pembelian barang yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun atau penggunaannya dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Berdasarkan PSAP 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran belanja diklasifikasikan sesuai dengan golongan ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Pada Laporan Realisasi Anggaran, belanja disajikan berdasarkan golongan ekonomi (jenis belanja). Klasifikasi atau golongan ekonomi bagi pemerintah daerah mencakup belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, bantuan sosial, bunga, hibah, subsidi, dan belanja tak terduga. Belanja barang dicatat dengan tujuan

menampung pembelian barang yang habis pakai, produksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang diserahkan kepada pihak ketiga (Hamzah & Kustiani, 2020).

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 04 mengenai Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, belanja barang digolongkan menjadi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas.

- a) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan dengan tujuan untuk menanggung kebutuhan sehari-hari kantor, pembelian perlengkapan seperti perlengkapan kantor, pembelian/penggantian perlengkapan kantor, listrik dan langganan jasa, dan pengeluaran lain untuk membiayai pekerjaan non-fisik, pembelian peralatan kantor yang tidak dapat mencukupi nilai minimum kapitalisasi yang diatur oleh pemerintah daerah/pusat dan pengeluaran jasa untuk pelayanan non fisik seperti biaya penelitian dan pelatihan.
- b) Belanja pemeliharaan adalah biaya untuk membuat aset tetap atau aset lainnya yang sudah dalam kondisi normal untuk bertahan lebih lama dari estimasi manfaatnya, dengan tidak melihat nilai jumlah yang dikeluarkan. Belanja pemeliharaan mencakup pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung pemerintahan, perbaikan struktur konstruksi, jalan, peralatan konstruksi, kendaraan dinas, jaringan irigasi, rumah dinas, peralatan peralatan mesin dan juga benda-benda lain yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintah.

- c) Belanja perjalanan dinas adalah biaya yang digunakan untuk mengakomodasi perjalanan dinas yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

2.1.2 Definisi dan Klasifikasi Beban Barang

Berdasarkan PSAP 12 mengenai Laporan Operasional, Beban merupakan potensi jasa atau manfaat ekonomi yang mengalami penurunan dalam suatu periode akuntansi yang mengurangi ekuitas, yang bisa berupa konsumsi atau pengeluaran aset atau menimbulkan kewajiban. Beban barang adalah beban yang timbul akibat pembelian barang habis pakai yang dipakai dalam proses produksi barang dan/jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan atau pengadaan barang dengan tujuan dijual kembali kepada masyarakat (Afiah, Mulyani, & Alfian, 2020).

Mengacu pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional, Beban dapat diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi memiliki prinsip dengan mengelompokkan beban berdasarkan jenisnya. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban hibah, beban penyusutan, beban bunga, beban barang, beban subsidi, beban bantuan sosial dan kontinjensi.

2.2 Pengakuan Belanja dan Beban Barang

Pengakuan dalam bidang akuntansi merupakan proses yang menentukan kriteria atau syarat untuk mencatat peristiwa atau kejadian dalam pencatatan akuntansi telah terpenuhi sehingga dapat menjadi bagian yang layak untuk memenuhi unsur aset, kewajiban, pendapatan-LRA, ekuitas, beban, pembiayaan, penghasilan-LO, dan pengeluaran yang selanjutnya akan dimuat dalam laporan keuangan entitas pelapor. Pengakuan akan tercermin dalam pencatatan sejumlah

uang pada pos-pos laporan keuangan yang dipengaruhi oleh peristiwa yang terhubung dengannya.

2.2.1 Pengakuan Belanja Barang

Berdasarkan PSAP 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Belanja akan diakui ketika terjadi pengeluaran dana dari rekening Kas Umum daerah/negara. Spesifik untuk pengeluaran yang terjadi melalui bendahara, pengakuan pengeluaran dilakukan ketika pertanggung jawaban atas pengeluaran disetujui oleh fungsi perbendaharaan.

Menurut Afiah, Mulyani, & Alfian (2020), Pengakuan belanja bergantung pada bagaimana pembayaran belanja tersebut antara lain:

- a) Setelah pengesahan definitif oleh fungsi BUD, terdapat pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum daerah
- b) Pengguna anggaran yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD mengesahkan pertanggungjawab atas pengeluaran
- c) Belanja pada badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur badan layanan umum

2.2.2 Pengakuan Beban Barang

Menurut PSAP 12 mengenai Laporan Operasional, secara umum beban akan diakui ketika:

- a) Timbulnya kewajiban

Timbulnya kewajiban yang dimaksud ketika hak dari orang lain mengalami perpindahan kepada pemerintah tanpa ada pengeluaran dana dari kas umum

daerah/negara. Contohnya seperti pemerintah tidak membayar tagihan listrik dan tagihan telepon.

b) Terjadi konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset merupakan peristiwa saat kas dibayarkan kepada pihak lain tanpa didahului dengan munculnya konsumsi aset bukan kas atau kewajiban dalam proses kegiatan operasi pemerintah.

c) Terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Manfaat ekonomi atau potensi yang turun terjadi saat nilai dari aset menurun karena pemakaian aset yang terkait/sepanjang waktu, misalnya penyusutan aset tetap/penyusutan aset tidak berwujud dan penyisihan piutang.

2.3 Pengukuran Belanja dan Beban Barang

Mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, pengukuran merupakan proses penentuan nilai untuk menentukan pengakuan dan penyertaan setiap pos pada laporan keuangan. Pengukuran pos-pos pada laporan keuangan memakai biaya historis. Penilaian pos-pos laporan keuangan memakai mata uang rupiah, dan transaksi yang memakai mata uang asing harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah. Pengukuran belanja dan beban diakui dan dicatat sejumlah nilai nominalnya yaitu rupiah yang dikeluarkan dari kas negara/daerah.

2.3.1 Pengukuran Belanja Barang

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, pengukuran belanja dicatat atas dasar bruto dan diukur

mengacu pada nilai nominal yang diterbitkan dan ditentukan pada dokumen penerbitan yang sah, seperti SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara atau dokumen pengesahan belanja yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah/Negara atau Kuasa Bendahara Umum Daerah/Negara.

2.3.2 Pengukuran Beban Barang

Mengacu pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional, beban yang diukur sebesar nilai liabilitas yang muncul, aset yang dipakai, hilangnya manfaat ekonomi, atau potensi jasa yang terjadi. Nilai barang tersebut kemudian diukur terhadap nilai wajar yang tercermin dalam dokumen bukti transaksi seperti kewajiban pembayaran dan tagihan rekening beban pihak ketiga yang disetujui/diratifikasi oleh PA/KPA.

2.4 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Barang

Mengacu pada PSAP 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran, belanja yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di laporan keuangan diklasifikasikan berdasarkan jenis belanjanya, yang digolongkan menurut belanja operasi, belanja modal dan belanja lain-lain/tak terduga. Untuk klasifikasi berdasarkan fungsi, organisasi dan klasifikasi lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan manajemen disajikan dalam lampiran yang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). LRA menjelaskan aktivitas keuangan pemerintah yang memperlihatkan ketaatan pemerintah terhadap APBD. LRA sekurang-kurangnya menyajikan unsur-unsur yang terdiri atas pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan (Moenek, Suwanda, & Rachmat, 2020).

Berdasarkan Buletin Teknis 04 mengenai Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, pengungkapan untuk klasifikasi belanja pada laporan keuangan harus diungkapkan di CaLK. Dalam PSAP 04 mengenai Catatan atas Laporan Keuangan berupa penjelasan dari Laporan Realisasi Anggaran untuk pos belanja, termasuk belanja barang, diungkapkan dengan struktur sebagai berikut Anggaran; Realisasi; Prosentase pencapaian; Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi; Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan; Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

2.5 Penyajian dan Pengungkapan Beban Barang

Berdasarkan PSAP 12 mengenai Laporan Operasional, Beban dapat diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi memiliki prinsip dengan mengelompokkan beban berdasarkan jenisnya. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban hibah, beban penyusutan, beban bunga, beban barang, beban subsidi, beban bantuan sosial dan kontinjensi.

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menyebabkan ekuitas bertambah dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah/pusat untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dalam satu periode pelaporan (Moenek, Suwanda, & Rachmat, 2020).

Mengacu PSAP 12 mengenai Laporan Operasional, Laporan operasional harus dijelaskan lebih rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan yang menyatakan

terkait hal-hal yang memiliki hubungan dengan kegiatan keuangan selama satu tahun, seperti kebijakan moneter dan fiskal, ditambah daftar dengan deskripsi yang lebih rinci terkait angka-angka yang perlu dijelaskan.

Berdasarkan PSAP 04 mengenai Catatan atas Laporan Keuangan, terkait menjelaskan pos beban pada Laporan Operasional, termasuk beban barang, diungkapkan dengan struktur sebagai berikut:

- a) Membandingkan antara periode sebelumnya dan sekarang;
- b) Menampilkan penjelasan untuk perbedaan antara periode sebelumnya dan periode berjalan;
- c) Memberikan rincian lebih lanjut mengenai beban berdasarkan klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; dan
- d) Menjelaskan hal penting yang dibutuhkan.